



**Judul** : Tentara Jadi Satpam di MA Kerdilkan TNI  
**Tanggal** : Minggu, 13 Nopember 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

# Tentara Jadi Satpam di MA Kerdilkan TNI

KEBIJAKAN penempatan anggota TNI untuk pengamanan di Gedung Mahkamah Agung (MA) mesti dihentikan. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, menilai itu menyalahi tugas pokok TNI yang diatur Undang-Undang (UU) No 34 Tahun 2004 tentang TNI serta mengerdilkan TNI secara kelembagaan.

“Tugas pokok TNI itu kan untuk menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah negara, bukan untuk menjaga hakim-hakim MA,” cetus Herdiansyah kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Penggunaan anggota TNI sebagai satuan pengamanan (satpam) di MA diketahui setelah tersiarnya penersangkaan seorang hakim agung oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada

Kamis (10/11).

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro beralih penempatan prajurit TNI untuk meningkatkan pengamanan sekaligus memastikan orang yang masuk ke Gedung MA memang tamu yang layak untuk mengecek perkembangan perkara.

Namun, menurut Herdiansyah, MA seharusnya meminta bantuan kepolisian. Penempatan tentara seolah membenturkan KPK dengan TNI.

Dalam menjawab kritik itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan penempatan prajurit TNI di MA tidak melanggar UU TNI. Pasalnya, TNI juga memiliki personel yang berdinasi di jajaran MA.

“Di tingkat pimpinan MA misalnya Dirjen Badilmiltun, terus Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung. Di UU Nomor 34 memang dinyatakan bahwa ada 10 institusi, kita

itu bisa menugaskan secara resmi mulai dari Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, dan seterusnya sampai Mahkamah Agung,” papar Panglima saat ditemui di Bali, Jumat (11/11).

Hingga kemarin, KPK belum mengungkap identitas hakim agung yang disebut sudah menjadi tersangka baru KPK. Meski begitu, MA menyebut inisial GZ yang merujuk pada nama Gazalba Saleh.

GZ hakim agung kedua yang detersangkakan KPK. Sebelumnya, ada hakim agung Sudrajad Dimiyati yang ditahan sejak 23 September 2022.

Ketua Ikatan Hakim Seluruh Indonesia Cabang MA Gayus Lumbuun mengatakan dua hakim agung jadi tersangka korupsi menunjukkan perlunya perombakan besar di tubuh MA yang dipimpin langsung oleh presiden. (Tri/Uta/P-2)